

# ANALISIS PENGELOLAAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Christopher Regi Febrian<sup>1</sup>, Catur Kumala Dewi<sup>2</sup>, Astrid Napita Sitorus<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email : [christopherregifebrian23@gmail.com](mailto:christopherregifebrian23@gmail.com)

---

## **Keywords :**

*Financial Performance,  
Budget Realization Report,  
Financial Ratio Analysis,  
APBD, Public Sector  
Financial Accounting.*

## **ABSTRACT**

*The objectives to be achieved and expected in this research are to determine and analyze the financial performance management of the Government of West Kutai Regency. This study focuses on evaluating the financial performance of the regional government based on the Budget Realization Report. The research method used in this study is descriptive qualitative.*

*This study uses financial ratio analysis as an analytical tool, which includes regional financial independence ratio, effectiveness ratio of regional original revenue, efficiency ratio of regional expenditure, growth ratio, and harmony ratio. The data used in this study are secondary data in the form of Budget Realization Reports of West Kutai Regency for a four-year period, namely from 2020 to 2023. The data were obtained from the Regional Financial and Asset Agency of West Kutai Regency.*

*The results of this study indicate that the financial performance of the Government of West Kutai Regency during the period 2020–2023 shows fluctuating conditions. The level of regional financial independence is still relatively low, indicating a high dependence on transfer funds from the central government. However, the effectiveness of Regional Original Revenue tends to be effective, while the efficiency of regional expenditure shows fairly efficient results. Overall, the management of regional financial performance in West Kutai Regency still needs improvement to achieve better financial independence and optimal budget management.*

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia menuntut adanya pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat. Keuangan daerah harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat yang

optimal bagi masyarakat. Menurut Mardiasmo (2019:15-20) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan sektor publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Fadillah Amin (2019:81) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber – sumber kekayaan daerah.

APBD berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat mengetahui kemampuan keuangan yang dimiliki dalam membiayai berbagai program dan kegiatan. Menurut Mahmudi (2019:141-143) menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah mampu menggali potensi sumber pendapatan daerah serta mengelola belanja daerah secara optimal. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan secara nyata. Salah satu laporan keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini menyajikan informasi mengenai perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah dalam satu periode anggaran. Menurut Halkadria Fitria (2019:38) menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, diperlukan suatu alat analisis yang mampu memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan daerah secara menyeluruh. Menurut Francis Hutabarat (2020:2) Pengertian Kinerja Keuangan dalam buku berjudul Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan adalah Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Salah satu alat analisis yang sering digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Analisis ini dapat digunakan untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, efisiensi belanja, serta keserasian belanja daerah. Mahmudi (2019:90) menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan terhadap Laporan Realisasi Anggaran dapat membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan yang telah dilakukan. Berdasarkan dari definisi yang ada diatas, maka disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan adalah suatu perhitungan matematis yang dimana dilakukan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari komponen dalam laporan keuangan, dimana digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari suatu organisasi dari tahun ke tahun.

**Tabel 1. Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kutai Barat Periode Tahun 2020 – 2023**

Uraian	Tahun 2020	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan LRA	Rp 2.394.215.427.872,37	Rp 2.219.431.739.046,89
Belanja Daerah	Rp 2.952.158.966.939,00	Rp 2.070.537.134.542,82
Uraian	Tahun 2021	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan LRA	Rp 2.247.965.483.906,00	Rp 1.973.323.752.485,71
Belanja Daerah	Rp 2.944.928.475.970,00	Rp 2.158.396.440.333,79
Uraian	Tahun 2022	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan LRA	Rp 2.666.243.589.708,00	Rp 2.759.277.049.254,21
Belanja Daerah	Rp 3.171.727.827.870,00	Rp 2.348.174.886.587,76
Uraian	Tahun 2023	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan LRA	Rp 3.602.666.831.166,00	Rp 4.186.068.369.743,27
Belanja Daerah	Rp 4.510.943.671.026,00	Rp 3.308.146.299.832,43

Sumber: BKAD Kabupaten Kutai Barat, 2024

Kabupaten Kutai Barat sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Timur juga dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerah secara optimal. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kutai Barat tahun 2020–2023, diketahui bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan

keuangan daerah masih perlu dievaluasi untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis terhadap pengelolaan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan daerah serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan di masa mendatang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.”**

## METODE PENELITIAN

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Penelitian Lapangan (*Field Work Research*). Pengumpulan data dan informasi yang sudah tersedia pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat. Data dan informasi tersebut berupa laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 - 2023.

### 2. Wawancara

Wawancara (Interview), yakni mencari data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang (Kabid) serta staf lainnya di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mendapatkan informasi mengenai data laporan APBD Tahun 2020 - 2023.

### 3. Alat Analisis

Data yang diperlukan di analisis dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari sebagai berikut :

#### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019:140), rasio kemandirian keuangan daerah adalah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 2. Pengukuran Kemampuan Daerah**

Kemampuan Daerah	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% – 25%	Instruktif
Rendah	25% – 50%	Konsultif
Sedang	50% – 75%	Partisipatif
Tinggi	75% – 100%	Delegatif

Sumber : Kepmendagri No.690.990.327 tahun 1996

## 2. Rasio Efektifitas

Menurut Mahmudi (2016:141–143), Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan dari pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dalam membandingkan target yang telah ditetapkan berdasarkan riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 3. Nilai Efektifitas PAD**

Kemampuan Keuangan	Rasio efektifitas
Sangat efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	<60%

Sumber : Kep. Mendagri (1996)

## 3. Rasio Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019:141), rasio efisiensi adalah rasio dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 4. Nilai Efisiensi PAD**

Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi
Sangat efisien	< 60%
Efisien	60% - 80%
Cukup efisien	80% - 90%
Kurang efisien	90% - 100%
Tidak efisien	> 100%

Sumber: Kep. Mendagri (1996)

## 4. Rasio Pertumbuhan

Rumus rasio (Mahmudi 2016:158) adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Th } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Th } (t - 1)}{\text{Realisasi Belanja Th } (t - 1)} \times 100\%$$

Keterangan : Th t = Tahun yang dihitung

Th (t - 1) = Tahun sebelumnya

**Tabel 5. Pengukuran Kriteria Rasio Pertumbuhan**

Keterangan	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber : Mahmudi (2016:160)

### 5. Rasio Keserasian

Rumus Analisis Keserasian Belanja Operasi terhadap total belanja Menurut Mahmudi (2019:162) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja operasi terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 6. Pengukuran Kriteria Rasio Keserasian**

Keterangan	Kriteria Rasio
Tidak Berimbang	0% – 20%
Kurang Berimbang	20% - 40%
Cukup Berimbang	40% - 60%
Berimbang	60% - 80%
Sangat Berimbang	80% - 100%

Sumber : Mahmudi (2016:162)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kutai Barat, provinsi Kalimantan Timur. Variabel yang diteliti adalah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah kabupaten Kutai Barat dan data penelitian yang digunakan penulisan adalah periode tahun 2020 – 2023.

### 1. Hasil Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 – 2023 berdasarkan Analisis Rasio Keuangan

**Tabel 7. Hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 - 2023 berdasarkan Rasio Keuangan**

Keterangan	2020	2021	2022	2023	Kinerja Keuangan
<b>Rasio KKD PAD</b>	10,47%	7,94%	9,60%	5,56%	Instruktif
<b>Rasio Efektivitas</b>	110,7%	125%	71,8%	106,1%	Sangat Efektif
<b>Rasio Efisiensi</b>	70,1%	73,3%	74%	73,3%	Efisien
<b>Rasio Pertumbuhan Belanja</b>	(-6,30%)	4,24%	8,76%	40,94%	Positif
<b>Rasio Keserasian Belanja Pada Belanja Operasi</b>	58,83%				Cukup Berimbang
<b>Rasio Keserasian Belanja Pada Belanja Modal</b>	25,54%				Kurang Berimbang

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Hasil penelitian kinerja keuangan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2020, 2021, 2022 dan 2023 dengan ditinjau alat analisis rasio keuangan, pengelolaan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selama periode 2020–2023 secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan oleh Kinerja Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk kategori rendah sekali (instruktif), efektivitas belanja yang sangat efektif, efisiensi belanja Kabupaten Kutai Barat yang efisien, pertumbuhan belanja pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang menuju positif dan untuk analisis keserasian belanja pada belanja operasi yang dapatkan dikatakan cukup berimbang dan untuk belanja modal masuk dalam kategori kurang berimbang. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan. Ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat perlu diminimalkan melalui penguatan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan keseimbangan alokasi belanja, khususnya belanja modal, agar dapat lebih mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkelanjutan. Dengan perbaikan pada aspek-aspek ini, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat lebih optimal di masa mendatang.

## **Pembahasan**

### **1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2023 ditinjau dari Analisis Rasio Kemandirian**

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2023 ditinjau dari analisis rasio kemandirian menunjukkan kinerja keuangan sangat rendah dimana pada tahun anggaran 2020 menunjukkan hasil perhitungan sebesar 10,47%, pada tahun anggaran 2021 menunjukkan hasil perhitungan sebesar 7,94%, pada , pada tahun anggaran 2022 menunjukkan hasil perhitungan sebesar 9,60%, dan pada tahun anggaran 2023 menunjukkan hasil perhitungan sebesar 5,56%. Dari hasil perhitungan rasio kemandirian tersebut sudah dapat dikategorikan rendah sekali pada presentase rasio 0-25% dengan pola hubungan instruktif atau peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Hal ini disebabkan karena kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang bergantung pada pendapatan yang diperoleh dari anggaran pemerintah pusat atau pendapatan transfer pemerintah pusat yang berkontribusi dibandingkan PAD dalam membangun otonomi daerahnya.

### **2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2023 ditinjau dari Analisis Rasio Efektivitas**

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2023

ditinjau dari analisis rasio efektivitas menunjukkan kinerja keuangan sangat efektif dimana pada tahun 2020 menunjukkan hasil perhitungan sebesar 110,7%, pada tahun 2021 menunjukkan hasil perhitungan sebesar 125%, pada tahun 2022 menunjukkan hasil perhitungan sebesar 71,8%, dan pada tahun 2023 menunjukkan hasil perhitungan sebesar 106,1%. Dari hasil perhitungan rasio efektivitas tersebut sudah dapat dikategorikan sangat efektif pada presentase >100%, itu dapat dilihat tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan efektif, walaupun tahun 2022 mengalami penurunan efektif yaitu pada 71,8%, tapi tahun 2023 meningkat lagi 106,1% walaupun tidak signifikan, tapi apabila dirata-ratakan seluruh hasil efektivitas tersebut, maka efektivitas pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan mendapatkan hasil sangat efektif atau dengan persentase >100%.

Hal ini disebabkan naiknya Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Kutai Barat karena mengelola PAD nya sangat baik, target anggaran tercapai serta pendapatan hasil kekayaan daerah yang diperoleh.

### **3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2023 ditinjau dari Analisis Rasio Efisiensi**

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2023 ditinjau dari analisis rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan yang efisien dimana pada tahun 2020 menunjukkan hasil perhitungan sebesar 70,1%, pada tahun 2021 dengan hasil perhitungan sebesar 73,3%, pada tahun 2022 dengan hasil perhitungan sebesar 74%, dan pada tahun 2023 dengan hasil perhitungan sebesar 73,3%. Dari hasil perhitungan rasio efisiensi tersebut sudah dapat dikategorikan efisien pada presentase rasio 60%-80%, dapat dilihat dari tahun 2020 -2022 mengalami peningkatan efisiensi, walaupun pada tahun 2023 mengalami penurunan 0,7%, tetapi hal tersebut tidak membuat penurunan rasio lewat dari 60%-80%, maka untuk tahun 2023 masih dikatakan efisien.

Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengupayakan penghematan belanja daerah yang dilakukan serta mengefisiensikan belanja dengan cukup baik.

### **4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2023 ditinjau dari Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja**

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2023 ditinjau dari analisis rasio pertumbuhan belanja mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 menunjukkan hasil perhitungan sebesar (-6,30%), pada tahun 2021 dengan hasil perhitungan sebesar 4,24%, pada tahun 2022 dengan hasil perhitungan sebesar 8,76%, dan pada tahun 2023 dengan hasil perhitungan sebesar 4,24%. Dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja tersebut sudah dapat dikategorikan positif.

Hal ini disebabkan naiknya anggaran belanja yang sudah ditentukan

Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat dalam melakukan pengendalian belanja, melakukan efisiensi belanja dan penghematan belanja.

## **5. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2023 ditinjau dari Analisis Rasio Keserasian Belanja**

### **a. Analisis Rasio Belanja Operasi**

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2023 ditinjau dari analisis rasio keserasian belanja pada belanja operasi menunjukkan menunjukkan lebih mengalokasikan belanja operasi yang dilaksanakan dimana pada tahun 2020 menunjukkan cukup berimbang dengan hasil perhitungan sebesar 60,3%, pada tahun 2021 hasil perhitungan sebesar 57,9%, pada tahun 2022 hasil perhitungan sebesar 62,3%, dan pada tahun 2023 hasil perhitungan sebesar 54,8%, dengan rata-rata rasio belanja operasi sebesar 58,83%. Dari hasil perhitungan rasio keserasian belanja pada belanja operasi tersebut dikategorikan cukup berimbang pada presentase rasio 40%-60%.

Hal ini menunjukkan bahwa keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat lebih proporsi pada belanja operasi dalam memperoleh kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan pemeliharaan aset, dan pembelian yang dibutuhkan dalam kegiatan yang diadakan.

### **b. Analisis Rasio Keserasian Belanja Pada Belanja Modal**

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2023 ditinjau dari analisis rasio keserasian belanja pada belanja modal menunjukkan kurang mengalokasikan belanja modal yang dilaksanakan dimana pada tahun 2020 menunjukkan kurang berimbang dengan hasil dengan perhitungan sebesar 22,22%, pada tahun 2021 hasil perhitungan sebesar 27,64%, pada tahun 2022 hasil perhitungan sebesar 21,7%, dan pada tahun 2023 hasil perhitungan sebesar 30,6%, dengan rata-rata belanja modal sebesar 25,54%. Dari hasil perhitungan rasio keserasian belanja pada belanja operasi tersebut dikategorikan kurang berimbang pada presentase rasio 20%-40%.

Hal ini menunjukkan bahwa keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kurangnya pendapatan yang diperoleh dalam berinvestasi yang berbentuk modal jangka panjang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengelolaan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun 2020–2023 yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. **Rasio kemandirian keuangan daerah** menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, sehingga kemandirian keuangan daerah berada pada kategori instruktif.
2. **Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)** secara umum berada pada kategori sangat efektif, meskipun pada tahun tertentu terjadi penurunan akibat target penerimaan yang tidak sebanding dengan realisasi.
3. **Rasio efisiensi belanja daerah** menunjukkan hasil yang efisien, yang mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran belanja telah dilakukan secara cukup hemat dan terarah.
4. **Rasio pertumbuhan belanja daerah** menunjukkan tren positif, khususnya pada tahun 2023, yang menandakan adanya peningkatan aktivitas dan pengelolaan anggaran daerah.
5. **Rasio keserasian belanja** menunjukkan bahwa alokasi belanja operasi tergolong cukup berimbang, namun alokasi belanja modal masih kurang berimbang sehingga belum optimal dalam mendukung pembangunan jangka panjang.

Secara keseluruhan, pengelolaan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selama periode 2020–2023 dapat dikatakan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan keseimbangan alokasi belanja.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi belanja modal agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel penelitian atau memperpanjang periode penelitian agar hasil analisis kinerja keuangan daerah menjadi lebih komprehensif dan objektif.

## REFERENCES

- Amin, Fadillah. 2019. *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. cetakan pertama. Malang: UB Press
- Fitria, Halkadria. 2019. *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. cetakan pertama. Malang: CV . IRDH
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN
- \_\_\_\_\_. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Keempat*. Yogyakarta: SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN
- Mardiasmo . 2020. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi